

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Strategi dan Implementasi Kebijakan: Tingkatkan Populasi Sapi Lokal dan Mencari Alternatif Sapi Bakalan atau Daging untuk Melepas Ketergantungan

### DASAR PEMIKIRAN

Beberapa waktu lalu pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia kembali mogok jualan di wilayah Jakarta Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Peralihan harga daging mahal disebabkan meningkatnya harga sapi impor dari Australia. Asosiasi tersebut menyampaikan harga daging sapi Rp 120 ribu – 114 ribu per kilogram (kg). Sebelumnya harga daging sapi itu menyentuh di level Rp 110 ribu per kg di tingkat pasar tradisional itu. Kenaikan harga daging sapi bergerak sejak bulan Juli 2020 hingga Januari 2021.

### KAJIAN EMPIRIS

Industri sapi potong atau pedaging, perkembangan secara massif dimulai dengan kegiatan usaha penggemukan sapi sekitar 1990an dengan mengimpor sapi jantan bakalan dari Australia ke Indonesia. Kondisi saat ini, ketersediaan sapi jantan lokal di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan asal daging sapi. Komoditas ternak sapi ini dalam usaha *feedlot* juga sudah mengindustri dengan parameter teknis yang stabil.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu mengembangkan usaha sapi lokal supaya tidak ketergantungan dari pemerintah Australia secara terus menerus. Sebab jika sewaktu-waktu peternakan sapi potong Australia mengalami problem maka Indonesia akan mendapatkan dampaknya.
2. Harga daging sapi harus serahkan ke pebisnis secara total, sedangkan pemerintah hanya bertindak menerbitkan regulasi yang kondusif bagi pebisnis. Seperti halnya industri perunggasan yang tidak memiliki anggaran sebesar. Bahkan over populasi meskipun tanpa intervensi pemerintah na-

mun bisa maju dengan pesat.

3. Pemerintah perlu menetapkan aturan impor daging beku hanya digunakan untuk bahan baku industri olahan sehingga mendapatkan harga yang lebih murah tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah bahkan bisa di ekspor.
4. Pemerintah perlu melakukan pelonggaran aturan impor sapi bakalan untuk kebutuhan. Sementara intervensi pemerintah yang terlalu masuk secara teknis membuat harga menjadi tidak kompetitif karena yang mengetahui persis soal naik atau tidaknya harga daging sapi adalah pebisnis.
5. Pemerintah perlu membuat keputusan politis yang tidak boleh dipolitisasi, semua keputusan harus dilakukan konsisten. Untuk menyelesaikan *constraints economic* maka harus di perhatikan dari berbagai aspek yaitu: teknis manajemen, infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya pakan, ekonomis, dan sumber pendanaan.
6. Semua pihak memberikan *effort* terhadap pengembangan budidaya penggemukan. Ditingkat peternak rakyat, pihak *feedloter* harus ikut berperan dan mendirikan industri pakan melalui *bunker silase*, *mini mixer*, gudang bahan baku konsentrat dengan teknologi. Guna mengintegrasikan efisiensi, nilai tambah, tempat pakan dan pupuk.
7. Fokus pemerintah melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan peternak sapi indukan lokal yang memiliki komunitas di tingkat peternak rakyat, agar bisa memproduksi sapi bakalan lokal sebanyak mungkin. Sementara para peternak skala kecil yang tidak dapat dikonsolidasikan harus di sinergikan melalui perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat kemudian para pebisnis setempat atau ditempat yang lain.
8. Pemerintah perlu menjamin agar terciptanya kolaborasi yang baik guna menciptakan kondusifitas bisnis, terutama melibatkan peternak rakyat. Pun membangun kerjasama dengan pebisnis, para importir daging sapi dengan komunitas peternak rakyat agar membangun perusahaan pembiakan sapi kolektif berjamaah, dengan tanggung jawab bersama untuk memelihara dengan melakukan pembiakan. Sehingga ini dapat menambah populasi indukan dalam negeri.
9. Pemerintah dapat melakukan proses pendampingan dan dikonsolidasikan, dan diperkuat melalui dari pihak pemerintah, perguruan tinggi dan pebisnis sehingga outputnya adalah menjadi kekuatan usaha kolektif yang profesional.